

Bus dan Angkot Listrik Masuk BRT



Sumber gambar : *Tribunkaltim.co* Kamis, 20/06/2024

➤ Dishub Samarinda Matangkan Rencana

SAMARINDA, TRIBUN – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Samarinda kembali mematangkan rencana Bus *Rapid Transit* (BRT) setelah mendapat arahan dari Wali Kota Andi Harun. Salah satu poin pentingnya adalah kembalinya bus listrik ke dalam konsep BRT, yang sebelumnya sempat dibatalkan.

Kepala Dishub Kota Samarinda, Hotmarulitua Manalu, menjelaskan bahwa bus listrik kembali dipertimbangkan karena beberapa alasan, seperti efisiensi, pembangunan berkelanjutan, pengurangan emisi gas rumah kaca, dan untuk mendorong penggunaan transportasi publik. “Bus listrik akan dioperasikan di trayek yang tidak terlalu menanjak. Sedangkan untuk medan yang berat, akan digunakan bus konvensional berbahan bakar solar,” ujar Manalu.

Selain bus listrik, Dishub juga berencana memasukkan angkot listrik ke dalam sistem BRT. Angkot listrik ini akan dioperasikan di trayek yang datar untuk menghindari konsumsi energi yang berlebihan.

Kata Manalu, untuk angkot listrik, Samarinda membutuhkan sekitar 63 unit untuk 7 trayek. “Saat ini, di Samarinda hanya ada sekitar 15 sampai 20 angkot yang memenuhi syarat untuk diubah menjadi angkot listrik,” ujarnya.

Pemkot Samarinda akan bekerja sama dengan Perumda Varia Niaga untuk mengelola BRT. Perumda Varia Niaga akan membeli bus dari Pemkot dan mengoperasikannya. “Sistem ini diharapkan lebih hemat biaya dibandingkan dengan sistem beli layanan yang sebelumnya ditolak oleh Wali Kota,” jelas Manalu.

Saat ini, Dishub sedang mematangkan konsep BRT. Selanjutnya, jika mendapat persetujuan dari Wali Kota Samarinda Andi Harun, pihaknya akan mengajukan anggaran melalui APBD Perubahan 2024.

“Ini masih mau dimatangkan lagi, supaya bisa mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Pengecasan nanti kita kerja sama. Kalau nanti beli bus dan angkot listrik, kita sediakan pul dan memasang semua kelengkapan kendaraan listrik tersebut,” pungkasnya.

Sebelumnya, sejak tahun lalu. Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Samarinda mengaku siap menyambut era baru mobilitas perkotaan yang lebih ramah lingkungan dan efisien untuk Kota Samarinda. Mengingat kemacetan yang kerap terjadi, polusi udara yang meningkat, dan keterbatasan pilihan transportasi.

Tak heran jika semangat tersebut mendorong rencana pengadaan angkutan umum massal yakni Bus *Rapid Transit* (BRT).

Hal ini dibuktikan melalui serangkaian studi banding yang dilakukan Dishub Samarinda ke beberapa kota di Indonesia untuk mempelajari berbagai sistem dan model angkutan massal yang telah sukses diterapkan. Mulai dari menyambangi Kota Jakarta, Banjarmasin, hingga salah satu yang akan dicontoh pihaknya adalah keberhasilan penerapan angkutan umum massal di Kota Banda Aceh.

Rencana ini memang tak mudah, anggaran yang dibutuhkan pun tak sedikit. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Dishub Samarinda Hotmarulitua Manalu beberapa waktu lalu. Menurut perhitungan pihaknya, rancangan tersebut membutuhkan anggaran sekitar Rp110 miliar untuk 7 trayek dan 6 *veeder*.

“Sudah kami ajukan ke TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah), karena perlu anggaran besar. Tapi kami usulkan dua atau empat trayek dulu, paling tidak anggarannya butuh sekitar Rp50 miliar,” sebut Manalu (6/5).

Terpisah, Wali Kota Samarinda Andi Harun menilai bahwa inisiasi tersebut memang dirasa ideal. Namun menurutnya, anggaran yang disebut terlalu besar. Belum lagi penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Samarinda memang difokuskan untuk pembenahan dan pembangunan.

“Kecuali APBD kita kayak DKI, ini kan APBD kita sangat terbatas. Itu juga kita pakai mengurus banjir, mengurus kesehatan, pendidikan, infrastruktur jalan, jembatan, dan lain-lain. Ya jadi kurang efisien,” ungkapnya tak lama ini.

Sebab itu, Andi Harun mengaku lebih setuju jika Dishub berfokus membeli bus baru yang akan dikelola oleh Pemkab Samarinda. Meski sistem ini akan jauh lebih rumit dibandingkan mekanisme beli layanan (*buy the service*) yang sebelumnya disarankan oleh Dishub.

“Tapi kalau kita mau beli mobil katakanlah sepuluh unit. Kan nggak habis sampai segitu. Paling mungkin Rp20 miliar, lalu kita *branding* sendiri dengan *branding* Samarinda. Itu mungkin jauh lebih efektif dan efisien. Kalau kita siapkan sendiri busnya, sistem pengelolaannya, kita harus rekrut sumber daya manusia (SDM)nya meskipun repot,” tuturnya.

Atas hal ini, orang nomor satu di Kota Samarinda ini mengarahkan Dishub untuk merubah mekanismenya agar dapat segera direalisasikan di tahun 2025 mendatang. “Memang jika harus bersabar. Kita mendahulukan kajian matang dan mempertimbangkan kemampuan,” pungkasnya. (snw)

Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, Bus dan Angkot Listrik Masuk BRT, 20/06/24

Catatan:

1. Dalam Pasal 138 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan diatur sebagai berikut:
 - (1) Angkutan umum diselenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan angkutan yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau.
 - (2) Pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
2. Dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi diatur sebagai berikut:
 - (1) Pemanfaatan energi dilakukan berdasarkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan:
 - a. mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya energi;
 - b. mempertimbangkan aspek teknologi, sosial, ekonomi, konservasi, dan lingkungan; dan
 - c. memprioritaskan pemenuhan kebutuhan masyarakat dan peningkatan kegiatan ekonomi di daerah penghasil sumber energi.
 - (2) Pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan wajib ditingkatkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah.